

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 7,15 persen, melaju dibandingkan Tahun 2018 yang sebesar 6,28 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,27 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen PMTB sebesar 20,35 persen. Sedangkan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV Tahun 2019 bila dibandingkan triwulan IV Tahun 2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 9,59 persen lebih laju bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,28 persen, dimana dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,07 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 41,01 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen, dimana dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,73 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 22,23 persen.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp166,40 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp111,00 triliun.

Pada bulan Februari Tahun 2020, dunia secara global dan Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tengah mengalami wabah pandemic *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* yang berakibat pada pembatasan aktivitas ekonomi secara langsung sebagai upaya meminimalisir cakupan penyebarannya yang sangat masif. Kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berawal pada penutupan beberapa industri barang dan jasa, pemberhentian hubungan kerja-PHK, penundaan investasi, pembatasan transportasi laut, udara dan darat, penutupan daerah wisata dan turunnya tingkat hunian hotel (*lower-occupational*).

Akibat dampak global tersebut, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2020 bila dibandingkan triwulan I Tahun 2019 (y-on-y) tumbuh hanya sebesar **4,91 persen** melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,54 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan

tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,11 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 22,04 persen. Sedangkan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I Tahun 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar **5,35 persen**, dimana dari sisi produksi, kontraksi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 23,93 persen. Pada sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 61,47 persen.

Tabel 3.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I - 2020 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan (persen)	
		Triwulan I-2020 terhadap Triwulan IV-2019 (q-to-q)	Triwulan I-2020 terhadap Triwulan I-2019 (y-on-y)	Triwulan I-2020 (q-to-q)	Triwulan I-2020 (y-on-y)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,53	-0,36	-0,39	-0,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,16	10,72	-0,52	1,70
C	Industri Pengolahan	5,13	16,11	0,69	2,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,74	4,65	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	3,17	2,32	0,00	0,00
F	Konstruksi	-23,93	4,62	-3,07	0,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,18	0,43	-0,50	0,04
H	Transportasi dan Pergudangan	-11,92	-5,54	-0,44	-0,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	6,88	0,01	0,00
J	Informasi dan Komunikasi	0,86	9,66	0,03	0,40
K	Jasa Keuangan	2	9,32	0,04	0,19
L	Real Estate	-3,79	1,56	-0,06	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	-5,11	0,30	-0,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-15,49	0,30	-0,01	0,00
P	Jasa Pendidikan	-6,11	0,76	-0,21	0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	8,38	0,01	0,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-0,13	3,86	0,00	0,03
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-5,35	4,91	-5,35	4,91

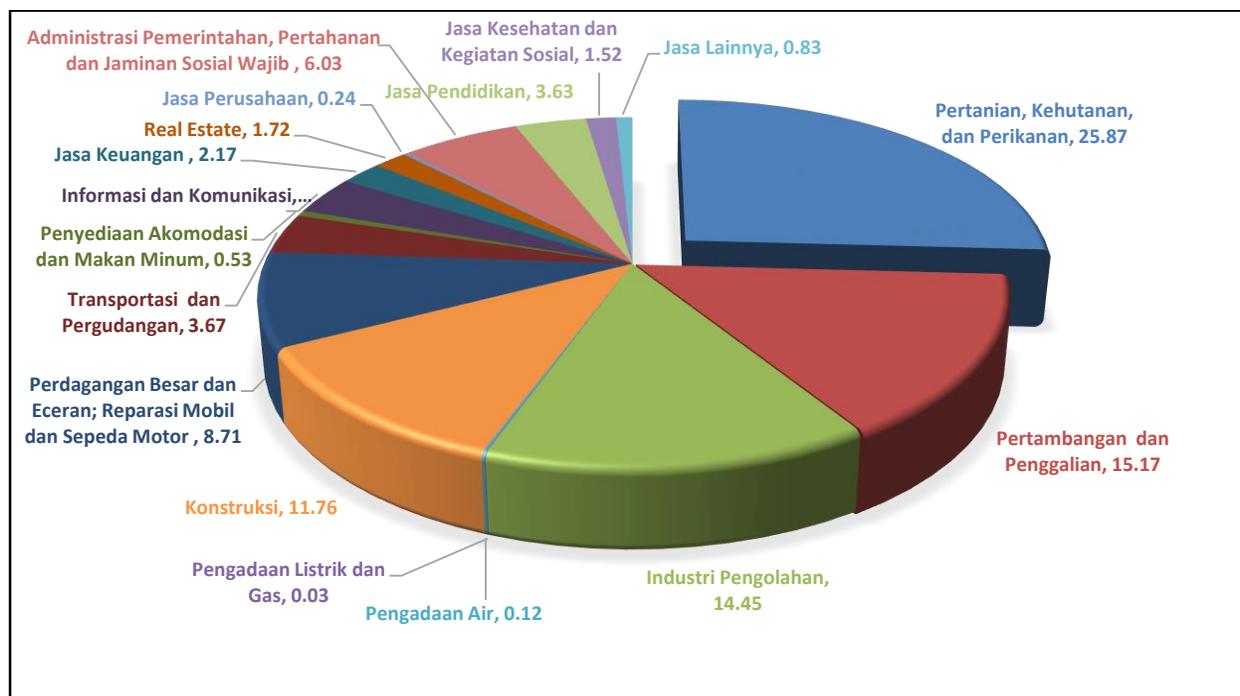
Sumber: BPS Sulteng, 2020

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 41,27 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 27,50 triliun.

Pada tahun 2020 struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I-2020 masih didominasi oleh kategori Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan dengan persentase sebesar 25,87 persen, lebih rendah dibandingkan Triwulan-I 2019 yang sebesar 27,42 persen. Kontribusi terbesar selanjutnya berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,17 persen, kategori Industri Pengolahan 14,45 persen dan Konstruksi sebesar 11,76 persen. Sedangkan kategori lainnya memberikan andil di bawah 10 persen (Gambar 3.1).

Gambar 3.1
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I-2020



Sumber: BPS Sulteng, 2020

Melihat trend kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 diatas, maka diperkirakan sampai dengan triwulan IV-2020, sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan angka tersebut dan juga pertimbangan dampak pandemic covid-19 serta masih dalam proses masa rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, maka Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada KUA Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020 sebesar 7-7,5 persen diproyeksikan akan terkoreksi sebesar 5,2-6,6 persen atau mengalami perubahan sebesar **0,9-1,8 persen.**

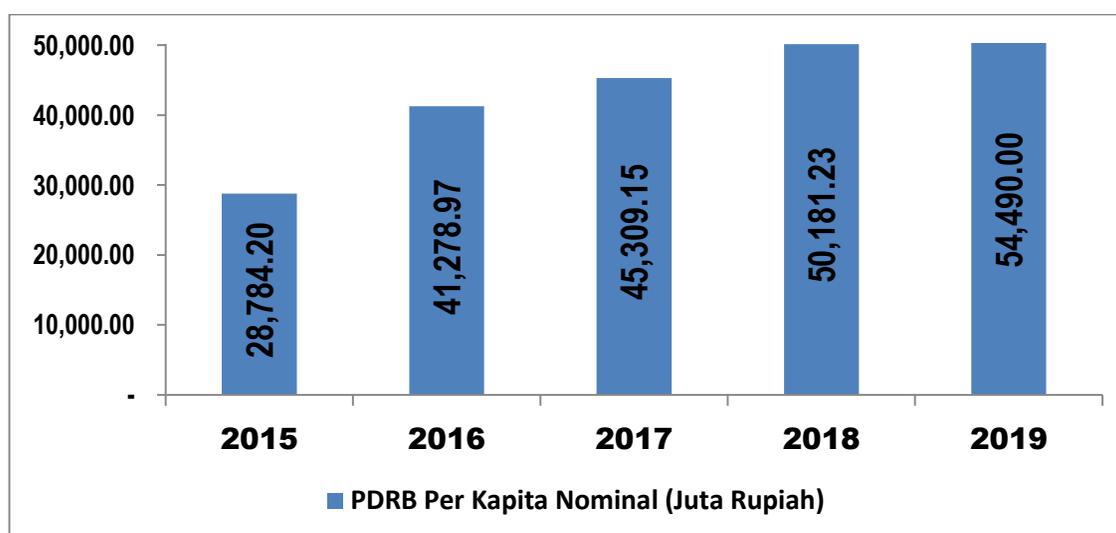
B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup

makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015-2019 juga menunjukkan trend yang positif. Pada Tahun 2015 PDRB Nominal Perkapita sebesar Rp. 28.784.20,- meningkat menjadi Rp.41.278,97,- di Tahun 2016, dan selanjutnya secara berturut-turut meningkat setiap tahun, di mana pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 45.309,15,- serta pada Tahun 2018 meningkat menjadi 50.181,23,- hingga menjadi Rp.54.490,00,- pada tahun 2019, dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2015-2019 sebesar 18,13 persen pertahun (Gambar 3.2). Tetapi pada pada Tahun 2020 diperkirakan rata-rata PDRB Per Kapita Sulawesi Tengah akan mengalami penurunan seiring dengan dampak Pandemic Covid-19.

Gambar 3.2
Perkembangan PDRB ADHB Perkapita
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2015-2019



Sumber : BPS Sulteng, 2020

C. Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi

Pada bulan Juni 2020 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar **0,43 persen**, sedangkan inflasi tahun kalender dari Desember 2019 hingga Juni 2020 sebesar **0,60 persen**, dan inflasi tahun ke tahun dari Juni 2019 hingga Juni 2020 sebesar **1,07 persen**. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi 0,34 persen dengan inflasi tahun kalender sebesar **0,60 persen** dan inflasi tahun ke tahun sebesar **0,98 persen**. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar **0,77 persen** dengan inflasi tahun kalender sebesar **0,56 persen** dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,39 persen.

Inflasi pada bulan Juni 2020 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar **1,35 persen**, diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar **0,81 persen**, kelompok pakaian dan alas kaki (0,26 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,09 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,06 persen), kelompok kesehatan (0,02 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,02 persen), serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,01 persen). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan, selama bulan Juni 2020 relatif stabil.

Tabel 3.2
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Juni 2020****

Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen		Inflasi Juni 2020* (%)	Inflasi Tahun Kalender 2020**	Inflasi Tahun ke Tahun*** (%)	Andil Inflasi (%)
	Mei 2020	Juni 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	105,68	106,13	0,43	0,60	1,07	0,43
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	109,16	110,04	0,81	2,60	2,55	0,22
2. Pakaian dan Alas Kaki	104,81	105,08	0,26	1,69	1,90	0,02
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,45	102,46	0,01	-0,02	-0,19	0,00
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,23	102,14	-0,09	-0,05	1,09	0,00
5. Kesehatan	107,27	107,29	0,02	0,69	1,38	0,00
6. Transportasi	101,74	103,11	1,35	-2,44	-4,48	0,18
7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,88	99,88	0,00	-2,49	-0,06	0,00
8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,08	101,14	0,06	0,45	-1,27	0,00
9. Pendidikan	110,77	110,77	0,00	0,00	5,48	0,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,11	113,21	0,09	1,32	4,58	0,01
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108,29	108,31	0,02	2,44	5,22	0,00

Ket :

*) Perubahan IHK bulan Juni 2020 terhadap IHK bulan sebelumnya

**) Perubahan IHK bulan Juni 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019

***) Perubahan IHK bulan Juni 2020 terhadap IHK bulan Juni 2019

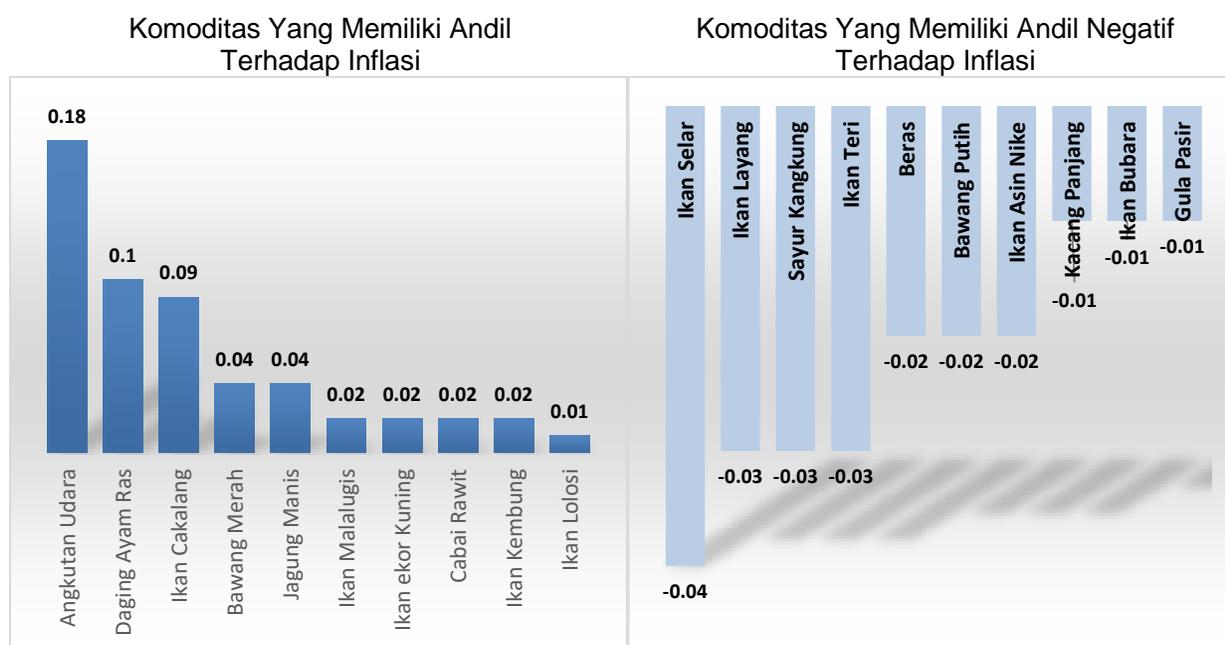
****) Sumber : BPS Sulteng (2020)

Inflasi pada bulan Juni 2020 sebesar 0,43 persen disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,22 persen, kelompok

transportasi sebesar 0,18 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil di bawah 0,01 persen, sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil negatif di bawah 0,01 persen. Pada periode yang sama kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok pendidikan relatif tidak mengalami perubahan.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain angkutan udara (0,18 persen), daging ayam ras (0,10 persen), ikan cakalang (0,09 persen), bawang merah (0,04 persen), jagung manis (0,04 persen), ikan malalugis (0,02 persen), ikan ekor kuning (0,02 persen), cabai rawit (0,02 persen), ikan kembung (0,02 persen), dan ikan lolosi (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain ikan selar (0,04 persen), ikan layang (0,03 persen), sayur kangkung (0,03 persen), ikan teri (0,03 persen), beras (0,02 persen), bawang putih (0,02 persen), ikan asin nike (0,02 persen), kacang panjang (0,01 persen), ikan bubara (0,01 persen), dan gula pasir (0,01 persen) (Gambar 3.3).

Gambar 3.3
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Juni 2020



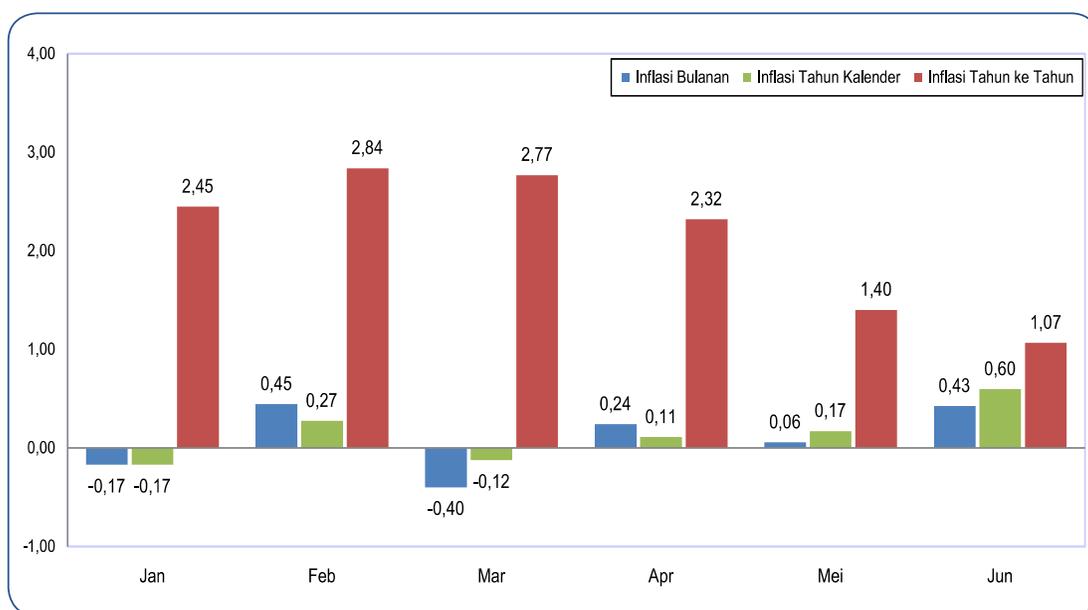
Sumber : BPS Sulteng (2020)

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mulai dihitung dan disajikan pada bulan Januari 2020. Inflasi gabungan dua kota pada bulan Juni 2020 sebesar 0,43 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dari Desember 2019 hingga Juni 2020 sebesar 0,60 persen, dan inflasi tahun ke

tahun dari Juni 2019 hingga Juni 2020 adalah sebesar 1,07 persen (Gambar 3.4).

Tingkat inflasi kalender Sulawesi Tengah mengalami angka yang fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2020. Berfluktuatif disebabkan oleh dampak peristiwa gempa bumi, liquifaksi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018 yang lalu ditambah lagi dampak global akibat pandemic Covid-19 terutama pada awal bulan Maret tahun 2020. Adapun tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami trend kenaikan akibat akumulasi dampak bencana alam, tetapi pada tahun 2019 inflasi dapat terkendali sampai sebesar 2,30 persen (yoy). Terkendalnya tingkat inflasi di Sulawesi Tengah dikarenakan keberhasilan pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga dan memenuhi ketersediaan komoditas utama untuk kebutuhan masyarakat melalui langkah koordinasi dan sinergitas antar instansi selain langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan stok komoditas utama. Tingkat inflasi kalender Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.4 dan tingkat inflasi tahunan pada Gambar 3.5 berikut ini.

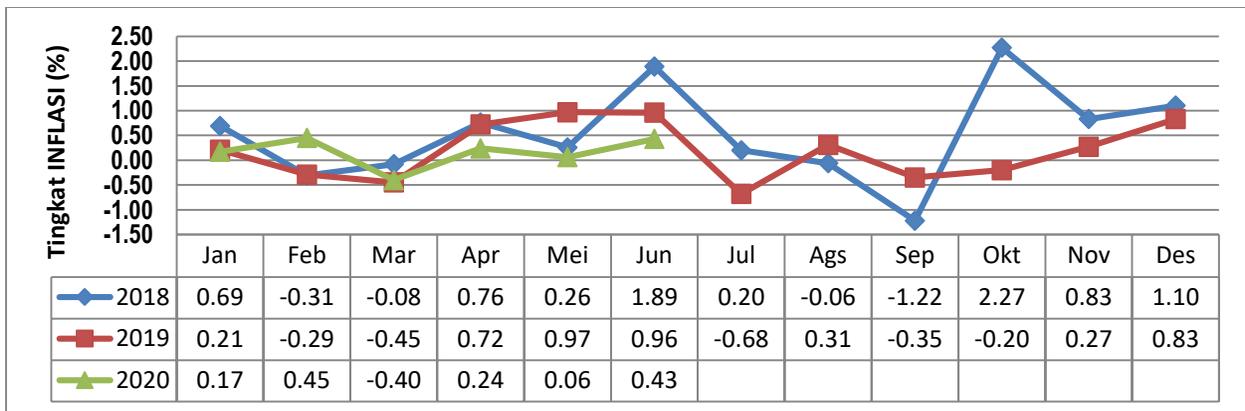
Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Juni 2020



Sumber : BPS Sulteng (2020)

Selanjutnya inflasi/deflasi kalender gabungan 2 (dua) kota di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut.

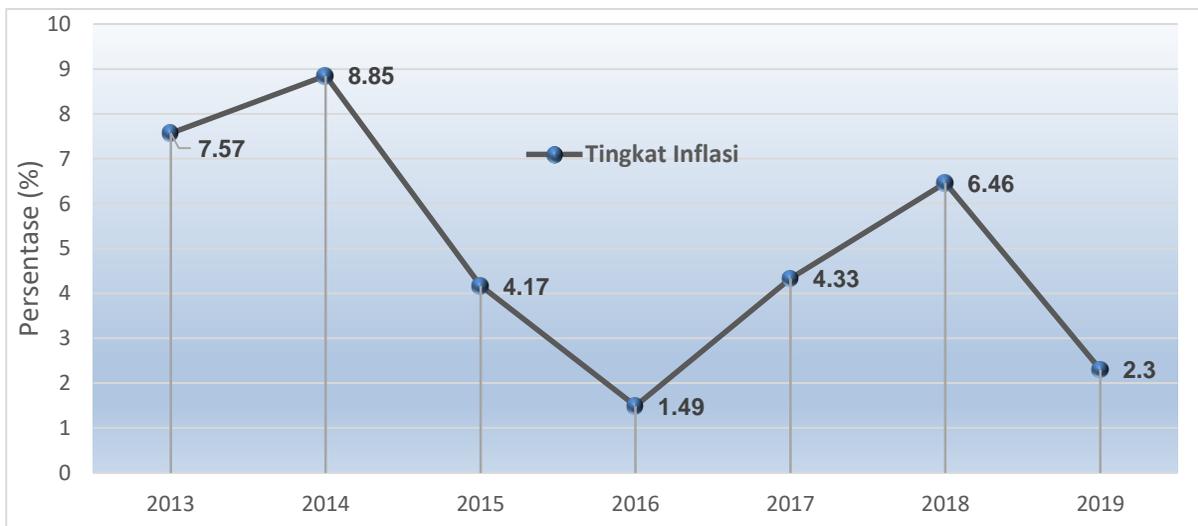
Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalender Gabungan 2 Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020



Keterangan : Semenjak tahun 2020 perhitungan Inflasi gabungan dilakukan pada 2 kota.
 Sumber : BPS Sulteng (2020)

Perkembangan Tingkat Inflasi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.5.
 Perkembangan Tingkat Inflasi (%) Sulawesi Tengah Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Sulteng (2020)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diproyeksikan inflasi pada Perubahan RKPD tahun 2020 akan berkisar sebesar 4,00-5,00 persen atau akan mengalami perubahan kenaikan sebesar 2,00-2,70 persen.

D. TPT dan TPAK

Pada bulan Februari tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 2,98 persen dan sebesar 71,10 persen. Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari sebanyak 1.577.323 orang, bertambah 28.684 orang dibandingkan angkatan kerja bulan Februari tahun 2019 sebanyak 1.548.639 orang.

Capaian TPT dan TPAK Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari tahun 2020 tersebut berada dibawah TPT Nasional sebesar 4,99 persen. Angka

capaian tersebut telah melampaui Target RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021. Meskipun fluktuatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah terus dapat ditekan di bawah angka nasional.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebanyak 1.530.259 orang, naik sebanyak 36,4 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi naiknya tenaga kerja adalah masyarakat Sulawesi Tengah sudah mulai pulih setelah satu tahun pasca bencana yang terjadi. Masyarakat yang tadinya tidak bekerja, saat ini sudah mulai kembali mencari pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Hal ini terjadi pada wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong serta Kota Palu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Februari 2019. TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 71,10 persen, naik 0,14 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK lebih disebabkan akibat dari meningkatnya penduduk yang menjadi bukan angkatan kerja, dikarenakan meningkatnya penduduk yang mendapatkan Pendidikan dengan bersekolah dibandingkan Februari 2019 (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Status Keadaan Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Tengah tahun 2018-2020*

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Perubahan 1 Tahunan (Feb 2019- Feb 2020)	
				Orang	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	2 142 956	2 182 376	2 218 544	36168	1.66
Angkatan Kerja	1 570 386	1 548 639	1 577 323	28684	1.85
Bekerja	1 520 304	1 493 796	1 530 259	36463	2.44
Pengangguran	50 082	54 843	47 064	-7779	-14.18
Bukan Angkatan Kerja	572 570	633 737	641 221	7484	1.18
Sekolah	154 642	175 059	184 330	9271	5.30
Mengurus Rumah Tangga	360 382	387 156	384 406	-2750	-0.71
Lainnya	57 546	71 522	72 485	963	1.35
			Persen	Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19	3,54	2,98	-0,56	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,28	70,96	71,10	0,14	

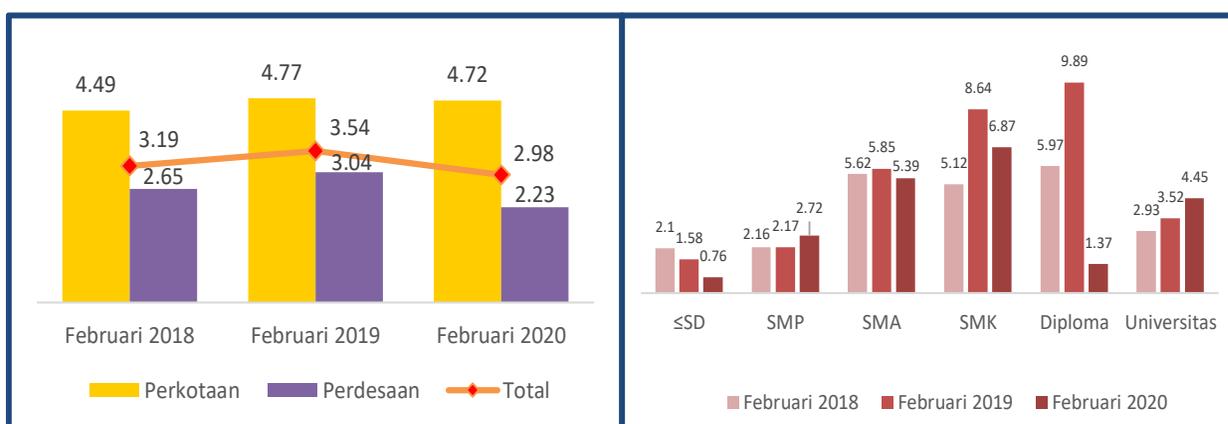
Sumber : BPS Sulteng (2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Februari 2020

sebesar 2,98 persen, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terdapat penurunan sebesar 0,56 persen poin.

TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Februari 2020, TPT di perkotaan sebesar 4,72 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,23 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan yaitu sebesar 0,05 persen poin di perkotaan, dan di perdesaan 0,81 persen poin. Sedangkan dari tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 6,87 persen, kemudian diikuti oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 5,39 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Perkembangan TPT Berdasarkan Tempat Tinggal dan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi, Februari 2018 – 2020



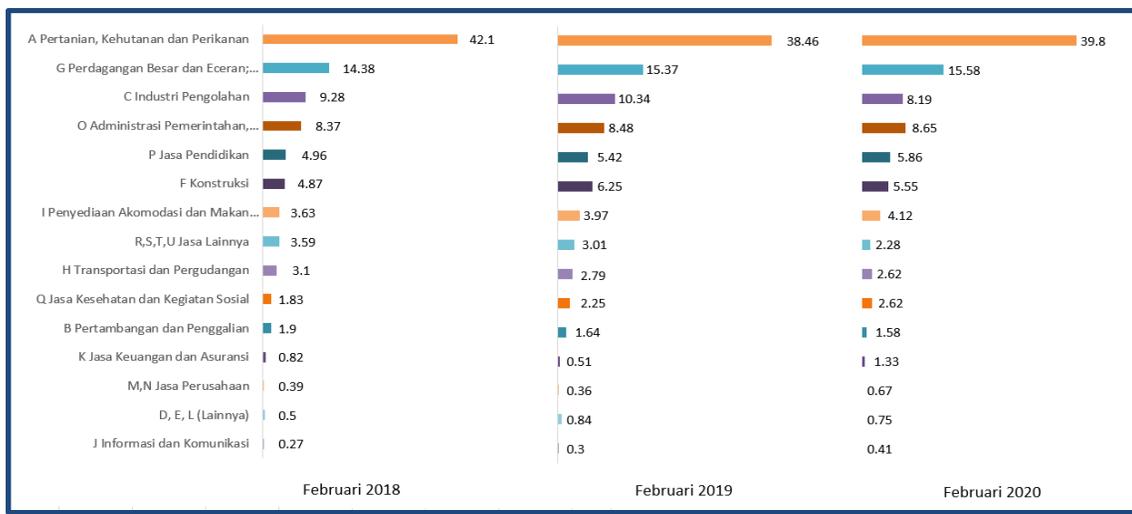
Sumber : BPS Sulteng (2020)

Mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT untuk pendidikan SD ke bawah memiliki nilai paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 0,76 persen. Pada Februari 2020 jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada tingkat pendidikan SD, SMA, SMK, Diploma sedangkan pada tingkat pendidikan SMP dan Universitas mengalami kenaikan.

Di lihat berdasarkan tren sektoral, selama Februari 2019 – Februari 2020, kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah pertanian (1,34 persen poin), Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,21 persen poin), Administrasi Pemerintahan (0,17 persen poin), Jasa Pendidikan (0,44 persen poin), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,15 persen poin), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,37 persen poin), Jasa Keuangan

dan Asuransi (0,82 persen poin), Jasa Perusahaan (0,31 persen poin) dan Informasi dan Komunikasi (0,11 persen poin), Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan persentase penduduk yang bekerja yaitu terjadi pada sektor Industri Pengolahan (2,15 persen poin), Konstruksi (0,7 persen poin), Jasa Lainnya (0,73 persen poin), Transportasi dan Pergudangan (0,17 poin), Pertambangan dan Penggalian (0,06 persen poin) (Gambar 3.7).

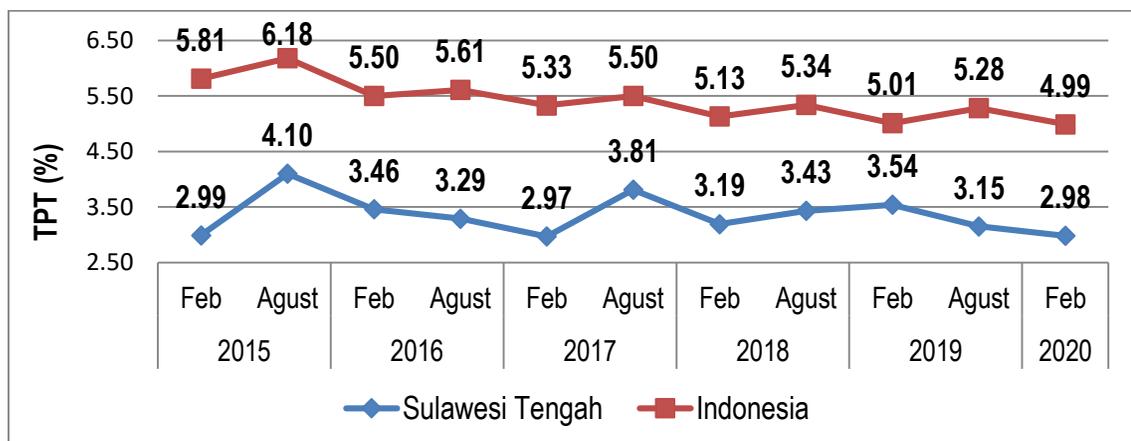
Gambar 3.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2018 – 2020



Sumber : BPS Sulteng (2020)

Adapun perkembangan TPT Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan trend yang fluktuatif tetapi angka TPT Sulawesi Tengah masih cukup baik karena berada di bawah rata-rata Nasional.

Gambar 3.8
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – Feb 2019



Sumber : BPS Sulteng (2020)

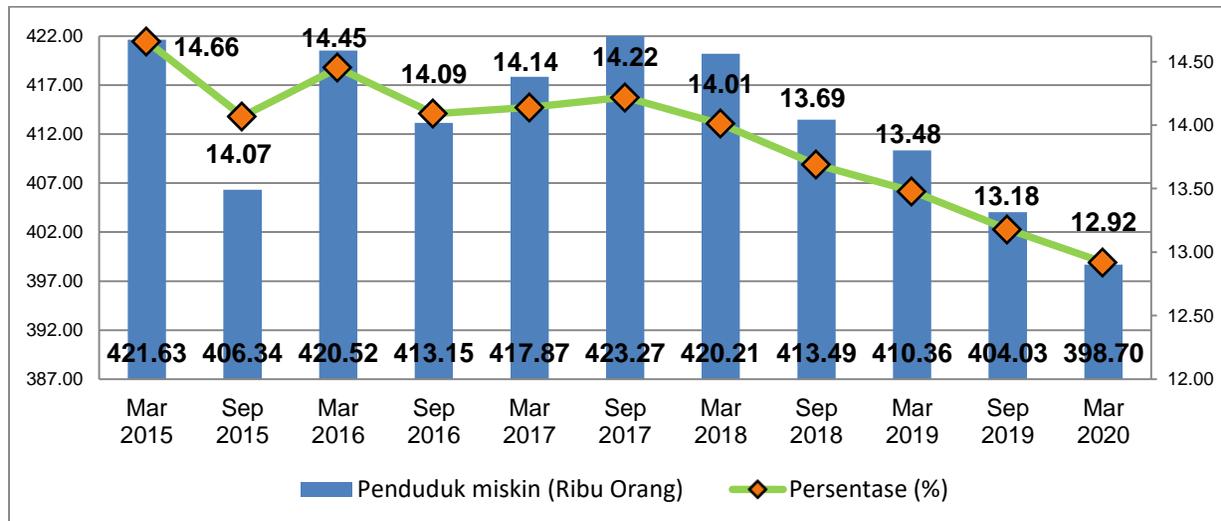
Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari-2020, maka TPT pada KU-APBD Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020 sebesar 3,5-4,0 persen diproyeksikan akan mengalami perubahan sebesar 3,00 persen.

E. Kemiskinan

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sulawesi Tengah, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Maret tahun 2020 berjumlah 398,73 ribu jiwa atau sebesar 12,92 persen dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 5,30 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi pada Bulan September 2019 sebesar 404,03 ribu jiwa atau sebesar 13,18 persen.

Secara umum, pada periode Maret 2015-Maret 2020 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2015 sampai dengan Maret 2020 ditunjukkan oleh Gambar 3.8.

Gambar 3.8
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2015 – Maret 2020



Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 76,54 persen. Kondisi ini menurun dibanding September 2019 yaitu sebesar 76,65 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, kue basah, telur ayam ras, tongkol/tuna/cakalang, gula pasir, mie

instan, cabe rawit, bawang merah, dan kopi bubuk/kopi instan (sachet). Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2020 mencapai 398,73 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 5,30 ribu orang dibandingkan September 2019 sebesar 404,03 ribu orang (13,18 persen). Sementara dibandingkan Maret 2018 jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sebanyak 11,63 ribu orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,73 ribu orang dan daerah perdesaan turun sebesar 4,57 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,90 persen menjadi 8,76 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 15,01 persen menjadi 14,69 persen (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2019-Maret 2020

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
Perkotaan		
Maret 2019	84,74	9,32
September 2019	81,46	8,90
Maret 2020	80,73	8,76
Perdesaan		
Maret 2019	325,62	15,26
September 2019	322,57	15,01
Maret 2020	318,00	14,69
Total		
Maret 2019	410,36	13,48
September 2019	404,03	13,18
Maret 2020	398,73	12,92

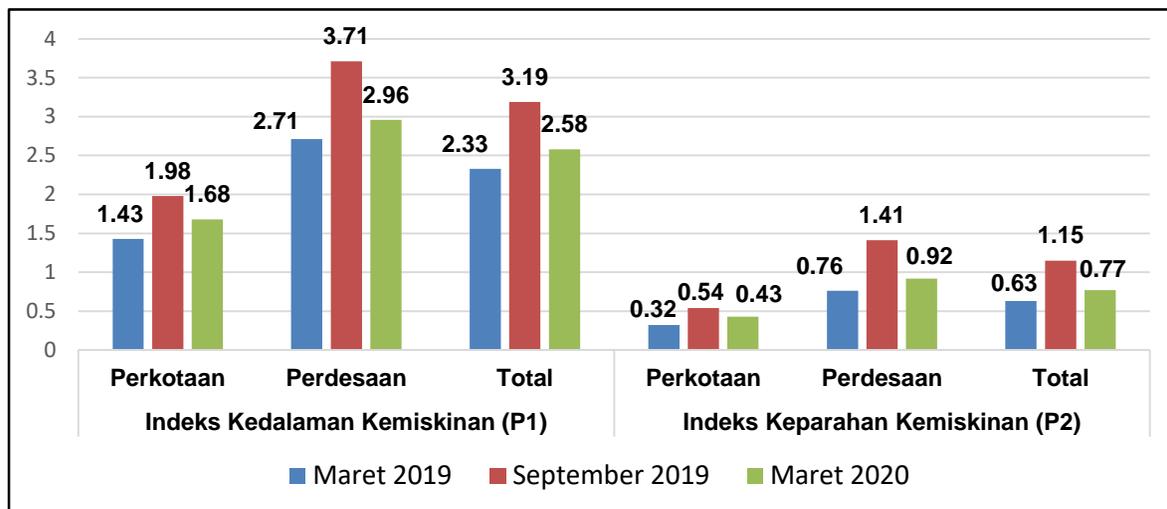
Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah 3,19 turun menjadi 2,58 pada Maret 2020. Kondisi yang sama juga terlihat pada Indeks Keparahannya Kemiskinan yang mengalami penurunan dari 1,57 menjadi 0,77 pada periode yang sama. Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu

bulan Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada bulan Maret 2020 masih lebih tinggi (Gambar 3.9).

Gambar 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020.



Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,68 sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,96. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,43, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,92.

Berdasarkan data-data tersebut di atas disimpulkan perubahan target indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian, Target KUA & PPAS, RPJMD dan Perubahan RKPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Indikator	Realisasi Capaian 2019	Target KUA & PPAS 2020	Target RPJMD 2020	Target Perubahan RKPD 2020
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,15	6,25-6,50	6,25-6,50	4,25-4,50
2.	PDRB Per Kapita (Jt Rp)	54,49	53,0-54,0	55,32	52,5-53,5
3.	Inflasi (%)	2,30	4,5-5	4,50-5,00	5,0-6,0
4.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	86,82	84,5-85,0	85,20-85,40	84,50-85,50
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,98	3,3	3,50-3,25	4,0 - 3,50

3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

A. Perubahan Kerangka Pendapatan

Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian dan kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menurunkan kegiatan perekonomian. Hal ini berimbas pada penurunan tingkat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kerja keras pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan diharapkan perolehan PAD dapat mencapai target yang ditetapkan.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.4.151.353.202.380,00.- menurun menjadi Rp.4.001.206.004.407,00, atau dengan perkataan lain terjadi penurunan sebesar Rp.150.147.197.973,00 dari target sebelumnya. Selanjutnya mengenai rincian proyeksi komponen dari Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PENDAPATAN DAERAH	4.151.353.202.380,00	4.001.206.004.407,00	-150.147.197.973,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.007.404.152.467,00	1.048.461.716.664,00	41.057.564.197,00
1.1.1	Pajak Daerah	824.000.000.000,00	852.700.000.000,00	28.700.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	8.232.348.000,00	12.948.259.455,00	4.715.911.455,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.965.608.967,00	16.965.608.967,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	158.206.195.500,00	165.847.848.242,00	7.641.652.742,00
1.2	Dana Perimbangan	3.091.969.271.800,00	2.912.459.299.800,00	-179.509.972.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.091.969.271.800,00	2.912.459.299.800,00	-179.509.972.000,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	205.582.623.800,00	109.652.784.800,00	-95.929.839.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.637.588.970.000,00	1.492.182.666.000,00	-145.406.304.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	1.248.797.678.000,00	1.310.623.849.000,00	61.826.171.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	51.979.778.113,00	40.284.987.943,00	-11.694.790.170,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.241.506.100,00	18.356.363.943,00	1.114.857.843,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya/DID	34.738.272.013,00	21.928.624.000,00	-12.809.648.013,00
1.3.4	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)	-	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2020 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.1.007.404.152.467,00 naik menjadi Rp.1.048.461.716.664,00. Kontribusi Dana Perimbangan terlihat mengalami penurunan dari target semula yakni dari sebesar Rp.3.091.969.271.800,00,00 menjadi Rp.2.912.459.299.800,00,-, jumlah tersebut terlihat sangat jauh melampaui target disebabkan belum ditetapkannya besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2020 pada saat penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana Insentif Daerah dengan jumlah sebesar semula ditargetkan sebesar Rp.51.979.778.113,00 menjadi Rp.40.284.987.943,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.11.694.790.170,00 dari proyeksi awal.

B. Perubahan Kerangka Belanja Daerah

Struktur Anggaran Pemerintah Daerah difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian sebagai langkah antisipatif dalam masa pandemi Covid-19. Anggaran pendidikan dan sektor lain mengalami penyesuaian untuk memenuhi *mandatory spending*. Efisiensi penganggaran dilaksanakan untuk rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal serta rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan mempertimbangkan kondisi eksisting pendapatan daerah.

Secara keseluruhan Total Belanja dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.4.341.261.096.242,00 mengalami perubahan atau meningkat menjadi Rp.4.431.145.660.206,60 atau dengan lain perkataan terjadi peningkatan sebesar Rp.89.884.563.964,60 dari target sebelumnya. Selanjutnya perubahan rincian target dari komponen Belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Rencana Perubahan Target Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
2	BELANJA	4.341.261.096.242,00	4.431.145.660.206,60	89.884.563.964,60
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.370.231.766.669,00	2.783.203.882.393,66	412.972.115.724,66
2.1.1	Belanja Pegawai	1.353.283.813.206,30	1.332.920.130.147,84	-20.363.683.058,46
2.1.2	Belanja Hibah	596.854.625.000,00	917.143.048.188,36	320.288.423.188,36
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	992.000.000,00	-508.000.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	393.130.000.000,00	444.099.612.260,65	50.969.612.260,65
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.963.328.462,70	46.975.933.200,00	24.012.604.737,30
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	41.073.158.596,81	38.573.158.596,81

NO	URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.971.029.329.573,00	1.647.941.777.812,94	-323.087.551.760,06
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	SURPLUS/(DEFISIT)	-189.907.893.862,00	-429.939.655.799,60	-240.031.761.937,60

Sumber: BPKAD, 2020 (diolah)

C. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah

Jumlah pembiayaan netto dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari target sebelumnya sebesar Rp.189.907.893.862,00 menjadi Rp.429.939.655.799,60 atau dengan perkataan lain jumlah pembiayaan netto meningkat sebesar Rp.240.031.761.937,60 dari target sebelumnya. Selanjutnya, uraian mengenai perubahan target pembiayaan daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3,1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.107.893.862,00	429.939.655.799,60	179.831.761.937,60
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	250.107.893.862,00	429.939.655.799,60	179.831.761.937,60
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	
3.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.200.000.000,00	-	-60.200.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	60.200.000.000,00	-	-60.200.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	189.907.893.862,00	429.939.655.799,60	240.031.761.937,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	(0,00)	(0,00)

Sumber: BPKAD, 2020 (diolah).